

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Mangkunegara (2020:2) Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Pelatihan Kerja merupakan bagian penting untuk kinerja pegawai. Menurut Mangkunegara (2020:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Ardana (2012:208) Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

Menurut Kasmir (2020:126) pelatihan kerja merupakan proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilakunya. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat bekerja yang

dapat mempengaruhi kesehatan, maka dibutuhkan pelatihan bagi pegawai agar mereka memahami tugas dan tanggung jawab serta dapat bekerja dengan baik sesuai aturan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

BPBD Kab. OKU dibentuk pada tahun 2010 yang tertuang dalam PERDA Kabupaten No. 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian pada tahun 2019 BPBD Kab OKU mengalami perubahan tipe kantor, yang dari sebelumnya tipe B menjadi tipe A yang di tetapkan dalam PERDA No. 04 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKU terdapat indikasi bahwa rendahnya kesadaran terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Relawan penanggulangan bencana terkait indikator keadaan tempat lingkungan kerja yang berbahaya dan beresiko mengalami kecelakaan kerja seperti daerah pengevakuasian yang rawan bencana seperti lingkungan daerah yang terjadinya bencana alam tanah

longsor, kondisi atau keadaan lingkungan kerja relawan yang cukup berbahaya dimana lokasi pengevakuasian yang dipenuhi longsor tanah dan disertai hujan yang melanda daerah tersebut dapat menghambat pergerakan relawan untuk mengevakuasi korban bencana sehingga kinerja relawan tidak maksimal, begitu pula daerah yang rawan terjadinya banjir, berikut pula dengan peristiwa kebakaran hutan dan ladang.

Untuk seluruh kegiatan pekerjaan lapangan dibutuhkan peralatan guna dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, dimana peralatan yang terdapat pada kantor BPBD belum cukup lengkap, terdapat beberapa contoh seperti kurangnya peralatan mobil tanki air bersih sehingga dilokasi kejadian minimnya pasokan air bersih untuk masak dan minum, serta kurangnya perahu untuk mengevakuasi korban banjir.

Kondisi fisik dan mental relawan juga menjadi hal utama yang perlu di perhatikan jika terjadi kecelakaan pada saat mereka bertugas dilapangan seperti tergores paku maupun benda tajam lainnya, kurangnya pemanasan sehingga terjadinya kaki keram saat berada di air, serta kondisi badan yang tidak sehat disaat pengevakuasian. Dengan kondisi lingkungan tempat kerja mereka yang berbahaya inilah diperlukan persiapan yang kuat bagi para relawan BPBD agar dapat menjalankan kinerja dengan baik.

Selain masalah K3 ditemukan juga fenomena terkait indikator Pelatihan Kerja yaitu instruktur dan materi, kurangnya pelatihan kerja yang diadakan pada kantor BPBD Kab.OKU karena terbatasnya dana yang dimiliki untuk melakukan pelatihan kerja sedangkan biaya yang di keluarkan untuk latihan personil relatif

tinggi kantor BPBD melakukan pelatihan mengikuti *Standar Operating Procedure (SOP)* tanpa instruktur khusus hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan relawan dalam penanganan korban bencana dan kurangnya kemahiran para relawan dalam penggunaan peralatan kerja, serta keterbatasan dana juga membuat peralatan yang dimiliki masih belum lengkap demikian hal ini mempengaruhi kualitas kinerja relawan seperti kurangnya alat guna mengevakuasi korban bencana dan relawan yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan dalam pengevakasian bencana akan mengalami kendala dalam bekerja hal ini dapat mempengaruhi seberapa tinggi kualitas kinerja pegawai para relawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : "**PENGARUH KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DAN PELATIHAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BPBD KAB. OKU**"

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah ada Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor BPBD Kab. OKU baik secara parsial maupun simultan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor BPBD Kab. OKU baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pelatihan kerja.

b. Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, menambah referensi perpustakaan dan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya.

c. Kantor BPBD Kab.OKU

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pelatihan kerja pegawai.